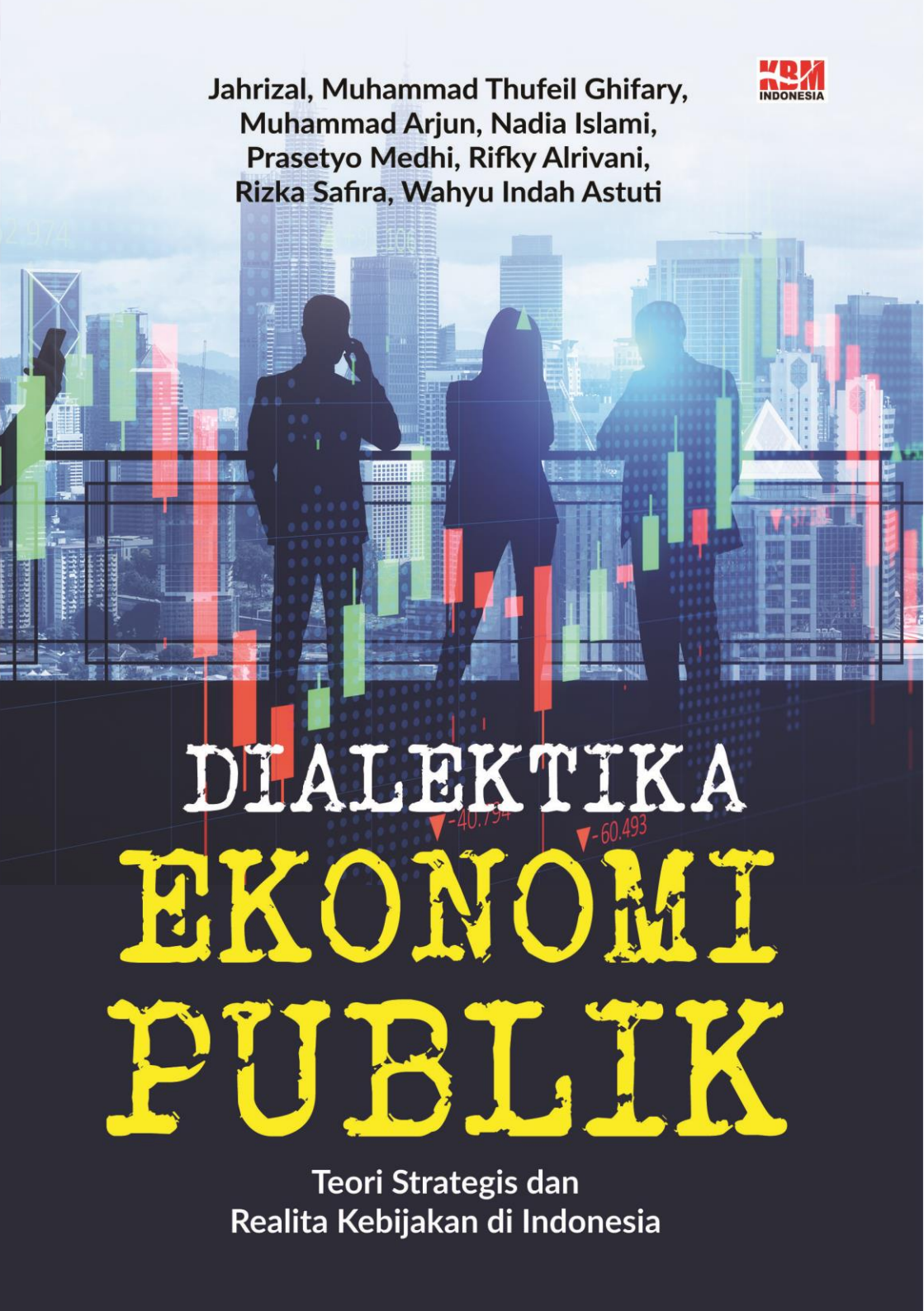


Jahrizal, Muhammad Thufail Ghifary,
Muhammad Arjun, Nadia Islami,
Prasetyo Medhi, Rifky Alrivani,
Rizka Safira, Wahyu Indah Astuti

KEM
INDONESIA



The background of the book cover features a city skyline with several skyscrapers. In the foreground, there are silhouettes of three people (two men and one woman) standing on a balcony or rooftop, looking out at the city. Overlaid on the image is a financial candlestick chart with green and red bars. Some numbers are visible on the chart, such as 2974, 500, -40.754, and -60.493. The title 'DIALEKTIKA EKONOMI PUBLIK' is prominently displayed in the center, with 'DIALEKTIKA' in white and 'EKONOMI PUBLIK' in yellow.

DIALEKTIKA EKONOMI PUBLIK

Teori Strategis dan
Realita Kebijakan di Indonesia

Dialektika EKONOMI PUBLIK

Teori Strategis dan Realita Kebijakan di Indonesia

Penulis

Jahrizal, Muhammad Thufeil Ghifary, Muhammad Arjun
Nadia Islami, Prasetyo Medhi, Rifky Alrivani
Rizka Safira, dan Wahyu Indah Astuti

Editor

Jahrizal, Azrul Muslihini, dan Rizka Safira



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

DIALEKTIKA EKONOMI PUBLIK: Teori Strategis dan Realita Kebijakan di Indonesia

Copyright @2026 by Jahrizal, dkk.

All rights reserved

PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Jahrizal, Muhammad Thufeil Ghifary, Muhammad Arjun,
Nadia Islami, Prasetyo Medhi, Rifky Alrivani,
Rizka Safira, dan Wahyu Indah Astuti

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Anggita Nur Aguspriyani

Editor Naskah

Jahrizal, Azrul Muslihini, dan Rizka Safira

14,8 x 21 cm, vi + 145 halaman

Cetakan ke-1, Juni 2026

E-ISBN: 978-634-278-433-4

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>, www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia, @penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya buku berjudul **“Dialektika Ekonomi Publik: Teori Strategis dan Realita Kebijakan di Indonesia”**. Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual terhadap jarak yang sering kali membentang lebar antara idealisme teks-teks teori ekonomi publik dengan kompleksitas implementasi kebijakan di lapangan.

Lebih dari sekadar diskursus konseptual, buku ini secara khusus dihadirkan untuk membedah terkait berbagai kebijakan ekonomi publik yang telah dan sedang berjalan di tanah air. Dalam konteks Indonesia, ekonomi publik bukan sekadar hitungan angka pertumbuhan atau distribusi fiskal. Ia adalah medan tempur dialektis, sebuah ruang di mana efisiensi pasar berbenturan dengan realitas politik, keterbatasan sumber daya, dan dinamika sosial.

Pembaca akan diajak untuk menelusuri berbagai spektrum kebijakan secara kritis, mulai dari peran negara dalam penyediaan barang publik hingga strategi kebijakan fiskal yang adaptif, berlandaskan pada data dan riset nyata. Harapan saya, buku ini dapat menjadi kawan diskusi bagi para akademisi, praktisi kebijakan, mahasiswa, maupun

masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam keputusan-keputusan publik di Indonesia.

Akhir kata, buku ini tentu masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi memperkaya dialektika pemikiran ekonomi kita di masa depan.

Pekanbaru, 20 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

BAB 1 **1**

PARADIGMA DAN EVOLUSI EKONOMI PUBLIK

1.1 Konsep Dasar dan Filosofi Ekonomi Publik.....	1
1.2 Evolusi Peran Negara dalam Perekonomian	6
1.3 Tantangan Globalisasi dan Digitalisasi terhadap Kebijakan Publik.....	10

BAB 2 **17**

TEORI KEGAGALAN PASAR DAN INTERVENSI STRATEGIS

2.1 Anatomi Kegagalan Pasar	17
2.2 Konsep Barang Publik dan <i>Free-Rider Problem</i>	20
2.3 Batas Rasionalitas Intervensi Negara: Antara Koreksi dan <i>Government Failure</i>	24

BAB 3 **27**

TEORI PILIHAN PUBLIK (*PUBLIC CHOICE THEORY*)

1.1 Aktor Politik sebagai Aktor Ekonomi.....	27
1.2 Proses Transaksi Politik dalam Kebijakan: Kompromi, Lobi, dan <i>Rent-Seeking</i>	31

- 1.3 Konsekuensi Kebijakan yang Inefisien: Beban
Makro dan Ketidakadilan Antargenerasi..... 33

BAB 4

37

EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

- 4.1 Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur
Dasar 37
- 4.2 Manajemen Rantai Pasok Nasional dan Efisiensi
Logistik..... 42
- 4.3 Skema Pembiayaan Infrastruktur dan Kemitraan
Pemerintah-Swasta (PPP)..... 43

BAB 5

45

TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN EFISIENSI ALOKASI

- 5.1 Prinsip Efektivitas dan Keadilan Anggaran 45
- 5.2 Pendekatan *Cost-Benefit Analysis* (Analisis Biaya-
Manfaat)..... 48
- 5.3 Patologi Birokrasi dan Kebocoran Anggaran 56

BAB 6

61

EKONOMI REGULASI DAN INSTITUSI

- 6.1. Peran Penting Kelembagaan (*Institutional
Economics*) 61
- 6.2. Ekonomi Regulasi dan Perlindungan Publik 67
- 6.3. Urgensi Deregulasi dan Reformasi Struktural..... 71

BAB 7

75

KERANGKA EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

- 7.1 Indikator Pengukuran Kinerja Kebijakan 75
- 7.2 Indikator Pengukuran Kinerja Kebijakan 78

BAB 8

81

REALITA, DIALEKTIKA, DAN AGENDA MASA DEPAN

- 8.1 Dinamika Keberlanjutan Layanan Publik Trans
Metro Pekanbaru 81
- 8.2 Konektivitas dan Eksternalitas Regional Jembatan
Siak sebagai Penggerak Ekonomi 84
- 8.3 Eksternalitas Negatif dan Krisis Barang Publik
Lingkungan pada Resolusi Kabut Asap 87
- 8.4 Ekologi Fiskal dan Ketahanan Bencana: Mengurai
Tata Kelola Drainase di Indragiri Hilir 90
- 8.5 Dialektika Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru:
Antara Idealitas Barang Publik dan Disfungsi Tata
Kelola 93
- 8.6 Reformasi Tata Kelola Stadion Utama Riau:
Menuju Aset Publik yang Produktif dan
Berkelanjutan 96
- 8.7 Paradoks Sumber Daya: Ketimpangan antara
Potensi Ekonomi dan Degradasi Lingkungan 99

BAB 9

109

BENCHMARKING INTERNASIONAL UNTUK AKSELERASI LOKAL

- 9.1 Reorientasi Strategis dalam Mengadopsi
Diamond Model dalam Kebijakan Publik 110

9.2	Manajemen Transportasi Publik: Kontrak Performa dan Efisiensi Operasional	111
9.3	Resiliensi Ekologi: Internalisasi Eksternalitas melalui Instrumen Fiskal	112
9.4	Arsitektur Tata Air: Dari Konstruksi Beton ke Ekosistem Resilien.....	113
9.5	Transformasi GovTech: Digitalisasi sebagai Akselerator Keadilan Publik	114
9.6	Sintesis: Mengintegrasikan Pelajaran Global ke dalam Peta Jalan Nasional.....	115

BAB 10

117

PARADIGMA BARU EKONOMI PUBLIK INDONESIA: REFLEKSI, RESILIENSI, DAN PROYEKSI MASA DEPAN

10.1	Sintesis Dialektika: Mengelola Ketegangan antara Teori dan Realita.....	117
10.2	Model Ketahanan Operasional Publik (<i>Public Operational Resilience</i>).....	120
10.3	Rantai Nilai Publik (<i>Public Value Chain</i>) dan Efisiensi Logistik	123
10.4	Digitalisasi GovTech 3.0: Dari Automasi ke Keputusan Prediktif	124
10.5	Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045	125
DAFTAR PUSTAKA		127
PROFIL PENULIS		135



BAB 1

PARADIGMA DAN EVOLUSI EKONOMI PUBLIK

1.1 Konsep Dasar dan Filosofi Ekonomi Publik

Ekonomi publik merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mengkaji peran negara dalam mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan kesejahteraan, serta menjaga stabilitas perekonomian. Berbeda dengan ekonomi mikro yang berfokus pada perilaku individu dan pasar, ekonomi publik menempatkan pemerintah sebagai aktor sentral yang memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi demi mencapai tujuan kolektif masyarakat.

Secara konseptual, ekonomi publik berangkat dari kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu

menghasilkan hasil yang efisien dan adil. Fenomena seperti kegagalan pasar (*market failure*) yang mencakup eksternalitas, barang publik, monopoli, dan asimetri informasi menjadi justifikasi utama bagi keterlibatan negara. Dalam konteks ini, negara hadir bukan untuk menggantikan pasar sepenuhnya, melainkan untuk memperbaiki distorsi yang muncul agar kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan.

Dari sisi filosofis, ekonomi publik berada dalam persimpangan antara dua arus pemikiran besar: liberalisme ekonomi dan intervensi negara. Pemikiran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith menekankan pentingnya mekanisme pasar melalui konsep *invisible hand*, di mana kepentingan individu secara tidak langsung dapat menghasilkan kesejahteraan kolektif. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pemikir seperti John Maynard Keynes menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu menstabilkan dirinya, terutama dalam kondisi krisis, sehingga intervensi pemerintah menjadi diperlukan untuk menjaga permintaan agregat dan stabilitas ekonomi.

Dengan demikian, ekonomi publik tidak berdiri pada satu kutub ideologis yang kaku, melainkan berkembang sebagai disiplin yang adaptif terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan sering kali bersifat pragmatis, menggabungkan prinsip efisiensi ekonomi dengan tujuan keadilan sosial. Hal ini tercermin dalam kebijakan fiskal, perpajakan, subsidi, serta penyediaan layanan publik yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam.

Lebih lanjut, ekonomi publik juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika. Pertanyaan mendasar seperti “siapa mendapatkan apa” dan “bagaimana distribusi sumber daya

seharusnya dilakukan” merupakan isu normatif yang tidak hanya bergantung pada analisis ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai sosial yang dianut oleh suatu negara. Dalam konteks Indonesia, misalnya, prinsip keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam ideologi negara menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan publik.

Seiring dengan perkembangan zaman, ruang lingkup ekonomi publik semakin meluas. Tidak hanya terbatas pada isu perpajakan dan pengeluaran pemerintah, tetapi juga mencakup tata kelola pemerintahan (*governance*), desentralisasi fiskal, ekonomi lingkungan, hingga peran negara dalam menghadapi disrupsi teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi publik merupakan disiplin yang dinamis dan terus berevolusi mengikuti perubahan tantangan global maupun domestik.

Pada akhirnya, pemahaman terhadap konsep dasar dan filosofi ekonomi publik menjadi fondasi penting untuk menganalisis kebijakan pemerintah secara kritis. Tanpa pemahaman ini, kebijakan publik berisiko dipandang secara parsial, hanya dari sisi teknis tanpa mempertimbangkan implikasi yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Definisi Menurut Pandangan Klasik

Pada era klasik, fokus ekonomi publik (yang saat itu lebih sering disebut sebagai *Public Finance* atau Keuangan Negara) sangat dibatasi oleh doktrin *laissez-faire*. Adam Smith, dalam karya monumentalnya *The Wealth of Nations* (1776), membatasi peran negara hanya pada tiga fungsi utama: pertahanan nasional, penegakan keadilan (hukum), dan penyediaan pekerjaan umum atau institusi publik yang tidak menguntungkan jika dikelola oleh swasta (seperti jalan raya dan jembatan). Dalam paradigma ini, ekonomi publik

dipahami secara sempit sebagai cara negara mengumpulkan pajak untuk membiayai pengeluaran minimalis tersebut agar pasar dapat bekerja tanpa gangguan.

Memasuki pertengahan abad ke-20, Richard Musgrave (1959) memberikan fondasi yang lebih kokoh melalui teori tiga fungsi pemerintah: alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi makro. Pada titik ini, ekonomi publik mulai diakui bukan sekadar soal pembukuan penerimaan dan pengeluaran negara, melainkan instrumen strategis untuk menjaga ekuilibrium sosial.

Definisi Menurut Pandangan Kontemporer

Paradigma Ekonomi publik mengalami pergeseran radikal di era kontemporer. Joseph Stiglitz (2015), seorang penerima Nobel Ekonomi, mendefinisikan ekonomi publik sebagai studi mengenai kegagalan pasar (*market failure*). Menurutnya, pasar bebas sering kali gagal menghasilkan efisiensi Pareto akibat adanya eksternalitas, asimetri informasi, dan pasar yang tidak lengkap. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah menjadi sebuah keharusan analitis, bukan sekadar pilihan politik.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, definisi ini diperkaya oleh realita hukum dan konstitusi. Mengacu pada Halim dkk. (2020), ekonomi publik dan keuangan negara di Indonesia dimaknai sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, yang dikelola secara terencana untuk mencapai amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi kontemporer tidak lagi melihat pemerintah sebagai sekadar “penjaga malam”, melainkan sebagai aktor proaktif yang harus mengoreksi ketimpangan, mengelola jaring pengaman sosial, dan

menyediakan barang publik yang gagal disediakan oleh mekanisme pasar.

Batas Pembeda Antara Sektor Publik dan Sektor Privat

Untuk membedakan kebijakan ekonomi, membedakan garis batas antara sektor publik (negara) dan sektor privat (swasta) adalah hal yang krusial. Meskipun di era modern batas ini sering kali beririsan, secara teoretis keduanya memiliki DNA yang bertolak belakang dalam tiga aspek fundamental:

1. Motif dan Orientasi Tujuan

- Sektor Privat: Bergerak dengan rasionalitas *profit maximization* (maksimalisasi keuntungan). Keputusan bisnis, efisiensi operasional, dan strategi alokasi sumber daya sepenuhnya diukur dari *Return on Investment* (ROI) atau nilai bagi pemegang saham (*shareholder value*).
- Sektor Publik: Digerakkan oleh *social welfare maximization* (maksimalisasi kesejahteraan sosial). Keputusan diambil untuk menyediakan layanan yang tidak menguntungkan secara finansial namun vital secara sosial, seperti subsidi kesehatan, pendidikan dasar, dan perlindungan lingkungan.

2. Karakteristik Barang dan Mekanisme Akses

- Sektor Privat: Menghasilkan “Barang Privat” (*Private Goods*) yang bersifat *excludable* (penggunaannya dapat dibatasi bagi yang tidak membayar) dan *rivalrous* (konsumsi seseorang mengurangi jatah orang lain). Akses sepenuhnya ditentukan oleh daya beli (*purchasing power*) melalui mekanisme harga pasar.
- Sektor Publik: Bertanggung jawab atas “Barang Publik” (*Public Goods*) yang idealnya bersifat *non-excludable* (tidak bisa melarang siapa pun untuk menikmatinya,

seperti lampu jalan atau keamanan nasional) dan non-rivalrous. Karena tidak ada yang mau membayar secara sukarela (*free-rider problem*), aksesnya didanai melalui mekanisme pemaksaan yang sah, yaitu pajak.

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Akuntabilitas

- Sektor Privat: Keputusan bersifat hierarkis dan cepat, bergantung pada dinamika penawaran dan permintaan. Akuntabilitasnya tertuju pada pemilik modal atau pemegang saham.
- Sektor Publik: Keputusan dihasilkan melalui proses dialektika politik yang panjang dan sering kali lambat, melibatkan eksekutif dan legislatif. Akuntabilitasnya bersifat universal kepada seluruh rakyat selaku wajib pajak.

1.2 Evolusi Peran Negara dalam Perekonomian

Peran negara dalam perekonomian tidak bersifat statis, melainkan mengalami evolusi panjang yang dipengaruhi oleh dinamika pemikiran ekonomi, perubahan struktur sosial, serta berbagai krisis yang membentuk ulang hubungan antara negara dan pasar. Memahami evolusi ini penting untuk melihat bahwa kebijakan publik yang ada saat ini merupakan hasil dari proses historis yang Panjang, bukan sekadar pilihan teknokratis yang berdiri sendiri.

Pada fase awal, terutama dalam era pemikiran klasik abad ke-18, peran negara dipandang sangat terbatas. Pemikir seperti Adam Smith menekankan prinsip *laissez-faire*, di mana negara sebaiknya hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, penegak hukum, dan penyedia barang publik dasar seperti pertahanan dan infrastruktur. Mekanisme pasar dipercaya mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui interaksi permintaan dan penawaran. Dalam paradigma ini,

intervensi negara dianggap berpotensi menciptakan distorsi dan menghambat efisiensi ekonomi.

Namun, optimisme terhadap pasar mulai mendapat tantangan seiring munculnya berbagai krisis ekonomi dan ketimpangan sosial yang semakin nyata. Puncaknya terjadi pada peristiwa *Great Depression*, yang menunjukkan kegagalan pasar dalam menjaga stabilitas ekonomi secara mandiri. Dalam konteks ini, pemikiran John Maynard Keynes menjadi titik balik penting. Keynes berargumen bahwa negara perlu berperan aktif melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengelola permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Era ini menandai lahirnya *welfare state*, di mana negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia kesejahteraan sosial.

Memasuki paruh akhir abad ke-20, peran negara kembali mengalami penyesuaian. Krisis fiskal, inefisiensi birokrasi, serta membengkaknya pengeluaran publik di banyak negara memunculkan kritik terhadap model negara kesejahteraan yang terlalu ekspansif. Pemikiran ekonomi yang lebih berorientasi pasar kembali menguat melalui tokoh-tokoh seperti Milton Friedman, yang menekankan pentingnya deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara dalam aktivitas ekonomi. Gelombang ini melahirkan apa yang dikenal sebagai *neoliberalisme*, yang mendorong efisiensi melalui kompetisi pasar dan peran sektor swasta.

Namun demikian, pendekatan berbasis pasar juga tidak lepas dari kritik, terutama setelah terjadinya krisis keuangan global seperti Global Financial Crisis 2008. Krisis ini kembali menegaskan bahwa pasar tidak selalu mampu mengatur dirinya sendiri tanpa pengawasan yang memadai. Negara

kembali dituntut untuk hadir, tidak hanya sebagai penyelamat dalam situasi krisis (*lender of last resort*), tetapi juga sebagai pengatur sistem yang mampu mencegah risiko sistemik.

Dalam konteks kontemporer, peran negara berkembang menuju bentuk yang lebih kompleks dan hibrid. Negara tidak lagi diposisikan semata sebagai “pengendali” atau “penonton”, melainkan sebagai *enabler*, *facilitator*, dan *orchestrator* dalam ekosistem ekonomi. Negara berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, mengatur pasar agar tetap kompetitif dan adil, serta memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih inklusif.

Di Indonesia, evolusi ini juga memiliki karakteristik tersendiri. Sejak masa awal kemerdekaan, negara memainkan peran dominan dalam perekonomian sebagai upaya membangun fondasi nasional. Peran ini kemudian mengalami liberalisasi pada periode tertentu, sebelum akhirnya bergerak menuju pendekatan yang lebih seimbang antara intervensi negara dan mekanisme pasar. Desentralisasi fiskal yang dimulai pada awal 2000-an menjadi salah satu tonggak penting dalam redefinisi peran negara, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan pelayanan publik.

Ke depan, peran negara tidak hanya dituntut untuk responsif terhadap dinamika ekonomi, tetapi juga proaktif dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketimpangan sosial. Negara perlu mengembangkan kapasitas untuk tidak hanya mengoreksi kegagalan pasar, tetapi juga mengantisipasi risiko masa depan serta membangun sistem ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, evolusi peran negara dalam perekonomian menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang bersifat universal. Setiap negara, termasuk Indonesia, perlu menemukan keseimbangan yang sesuai dengan konteks historis, sosial, dan ekonominya. Peran negara yang efektif bukan ditentukan oleh seberapa besar atau kecil intervensinya, melainkan oleh seberapa tepat, adaptif, dan berdampak kebijakan yang dihasilkan.

Era Laissez-Faire dan Pasar Bebas Murni Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, pemikiran ekonomi didominasi oleh mazhab Klasik yang dimotori oleh Adam Smith. Melalui doktrin laissez-faire, negara diposisikan secara minimalis, sekadar sebagai “penjaga malam” (*night-watchman state*). Keyakinan utamanya adalah bahwa pasar memiliki mekanisme perbaikan otomatis melalui “tangan tak terlihat” (*invisible hand*). Setiap individu yang mengejar kepentingan pribadinya dipercaya akan secara otomatis mendorong efisiensi dan kesejahteraan kolektif (Smith, 1776). Dalam paradigma ini, intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi harga atau subsidi dianggap sebagai distorsi yang akan merusak ekuilibrium alamiah pasar.

Depresi Besar dan Intervensi ala Keynesian Keyakinan pada pasar bebas murni hancur ketika dunia dihantam *Great Depression* pada tahun 1930-an. Pasar terbukti lumpuh; pengangguran merajalela dan mekanisme harga gagal mengembalikan keseimbangan. Merespons kebuntuan ini, John Maynard Keynes (1936) meruntuhkan tabu intervensi negara melalui karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Keynes berargumen bahwa pasar sering kali terjebak dalam keseimbangan di bawah kapasitas penuh (*underemployment equilibrium*) akibat kurangnya permintaan agregat. Oleh karena itu, negara harus turun tangan secara

aktif melalui kebijakan fiskal ekspansif, seperti belanja infrastruktur yang dibiayai utang (*deficit spending*), untuk memompa daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali roda ekonomi. Negara tidak lagi menjadi penonton, melainkan motor penggerak utama.

Pandangan Modern: Negara sebagai Fasilitator dan Regulator Meskipun teori Keynesian berhasil menyelamatkan kapitalisme, krisis inflasi dan stagnasi (*stagflation*) pada tahun 1970-an memunculkan kritik baru yang melahirkan Sintesis Neoklasik dan pandangan ekonomi kelembagaan. Saat ini, pandangan modern meyakini bahwa pendulum tidak boleh berada di titik ekstrem. Stiglitz dan Rosengard (2015) menegaskan bahwa peran negara di abad ke-21 adalah mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*) tanpa memunculkan kegagalan pemerintah (*government failure*).

Negara modern dituntut untuk hadir dalam kapasitas yang lebih canggih: bukan lagi sekadar mengambil alih produksi dari swasta, melainkan sebagai regulator yang memastikan persaingan usaha yang sehat, penyedia jaring pengaman sosial, serta fasilitator yang menginternalisasi eksternalitas negatif (seperti pajak karbon untuk polusi). Negara modern adalah instrumen penyeimbang antara efisiensi alokasi kapital dan keadilan distributif.

1.3 Tantangan Globalisasi dan Digitalisasi terhadap Kebijakan Publik

Memasuki abad ke-21, arsitektur ekonomi publik menghadapi ujian eksistensial yang belum pernah terjadi pada era Smith maupun Keynes. Batas-batas kedaulatan ekonomi negara-bangsa menjadi semakin berpori (*porous*) akibat dua disrupsi utama: globalisasi yang terakselerasi dan

revolusi ekonomi digital. Kondisi ini memaksa para pembuat kebijakan untuk terus-menerus meredesain instrumen ekonomi publiknya.

Globalisasi telah mengintegrasikan perekonomian dunia melalui arus perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka. Dalam konteks ini, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan dalam menentukan arah ekonomi domestik. Keputusan kebijakan publik harus mempertimbangkan tekanan eksternal, seperti dinamika pasar global, perjanjian internasional, serta persaingan antarnegara dalam menarik investasi. Ketergantungan yang tinggi terhadap ekonomi global juga membuat negara lebih rentan terhadap guncangan eksternal, seperti krisis keuangan, fluktuasi harga komoditas, maupun disrupsi rantai pasok global.

Namun, globalisasi juga menghadirkan dilema kebijakan. Di satu sisi, keterbukaan ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan melalui spesialisasi dan akses pasar yang lebih luas. Di sisi lain, globalisasi berpotensi memperlebar ketimpangan, baik antarnegara maupun di dalam negeri. Kelompok masyarakat yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan global sering kali tertinggal, sehingga memunculkan tuntutan terhadap negara untuk memperkuat fungsi redistribusi dan perlindungan sosial.

Seiring dengan itu, digitalisasi menjadi kekuatan transformatif yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi seperti *big data*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan platform digital telah menciptakan model bisnis baru yang melampaui batas-batas regulasi konvensional.

Perusahaan teknologi global seperti Google, Amazon, dan Alibaba Group menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi dapat terkonsentrasi pada aktor non-negara dengan skala global.

Bagi pembuat kebijakan, digitalisasi menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Dari sisi tantangan, regulasi sering kali tertinggal dibandingkan dengan kecepatan inovasi teknologi. Hal ini terlihat dalam isu perpajakan ekonomi digital, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap praktik monopoli di pasar digital. Selain itu, digitalisasi juga berpotensi menggantikan pekerjaan manusia melalui otomatisasi, sehingga menimbulkan implikasi sosial yang signifikan, seperti pengangguran struktural dan perubahan pola kerja.

Di sisi lain, digitalisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Pemanfaatan data secara real-time memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif. Layanan publik dapat didigitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Dalam konteks ini, konsep *digital government* atau pemerintahan berbasis elektronik menjadi semakin relevan sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola publik.

Dalam menghadapi dua kekuatan ini, negara dituntut untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan yang lebih fleksibel dan inovatif. Kebijakan publik tidak lagi dapat dirancang secara statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan tidak terduga. Pendekatan regulasi juga perlu bergeser dari model yang kaku menuju model yang lebih eksperimental dan berbasis prinsip

(*principle-based regulation*), yang memberikan ruang bagi inovasi tanpa mengorbankan perlindungan publik.

Dalam konteks Indonesia, tantangan globalisasi dan digitalisasi memiliki dimensi yang lebih kompleks. Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital yang terus berkembang pesat. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan infrastruktur dan literasi digital antarwilayah yang dapat memperlebar ketimpangan jika tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, kebijakan publik harus mampu menjembatani kesenjangan tersebut melalui investasi infrastruktur digital, penguatan sumber daya manusia, serta regulasi yang inklusif.

Lebih jauh, globalisasi dan digitalisasi juga menuntut redefinisi kedaulatan negara. Kedaulatan tidak lagi hanya berkaitan dengan wilayah geografis, tetapi juga mencakup kendali atas data, teknologi, dan sistem ekonomi digital. Negara perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menguntungkan aktor global, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat domestik.

Pada akhirnya, tantangan globalisasi dan digitalisasi menegaskan bahwa kebijakan publik harus bergerak menuju paradigma yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis resiliensi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator inovasi dan pelindung kepentingan publik di tengah perubahan yang semakin cepat. Tanpa kemampuan untuk beradaptasi, kebijakan publik berisiko menjadi usang; tetapi dengan pendekatan yang tepat, globalisasi dan digitalisasi dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerentanan di Era Globalisasi menciptakan inter-konektivitas rantai pasok dan aliran modal lintas batas yang

masif. Di satu sisi, hal ini mendorong efisiensi global, namun di sisi lain, mengimpor risiko. Krisis Finansial Global 2008 dan guncangan rantai pasok akibat pandemi COVID-19 membuktikan betapa rentannya perekonomian domestik terhadap efek penularan (*contagion effect*) dari luar. Rodrik (2011) dalam analisisnya mengenai *Globalization Paradox* menyoroti bahwa negara menghadapi trilema: sulit untuk mempertahankan secara bersamaan demokrasi, kedaulatan nasional, dan integrasi ekonomi global (*hyperglobalization*). Kebijakan publik modern dipaksa beradaptasi: negara harus menjaga iklim ramah investasi tanpa mengorbankan resiliensi industri dalam negeri, serta menyusun kebijakan perlindungan (hambatan non-tarif) yang tidak melanggar kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Disrupsi Ekonomi Digital merupakan tantangan yang tak kalah radikal datang dari digitalisasi. Transisi menuju ekonomi gig (*gig economy*), perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan dominasi korporasi teknologi multinasional membuat kerangka regulasi konvensional menjadi usang. Salah satu pukulan terbesar terjadi pada kebijakan fiskal. Mulyanto (2022) mencatat bahwa lanskap digital menciptakan model bisnis di mana perusahaan dapat meraup keuntungan triliunan rupiah dari suatu negara tanpa perlu memiliki kehadiran fisik (Bentuk Usaha Tetap/BUT) di negara tersebut. Hal ini memicu erosi basis pajak (*base erosion and profit shifting*), memaksa negara-negara termasuk Indonesia untuk merumuskan ulang konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) digital dan pajak transaksi elektronik.

Selain itu, digitalisasi melahirkan bentuk asimetri informasi baru melalui algoritma dan penguasaan *big data*. Negara kini dituntut memiliki infrastruktur kebijakan siber untuk melindungi privasi warganya dan mencegah monopoli

data oleh segelintir korporasi teknologi (Nugroho et al., 2021). Dengan demikian, kebijakan ekonomi publik tidak lagi berputar pada isu konvensional seperti subsidi barang fisik, melainkan meluas pada tata kelola aset tak berwujud (*intangible assets*), inklusi keuangan digital, dan penciptaan regulasi yang lincah (*agile regulation*) agar tidak menghambat inovasi namun tetap menjaga keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, A., Roubini, N., & Cohen, G. D. (1997). *Political cycles and the macroeconomy*. MIT Press.
- Araral, E., & Hartley, K. (2013). *Public policy: Concepts, analysis and methods*. McGraw-Hill Education.
- Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229.
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy*. University of Michigan Press.
- Burke, P. J., & Resosudarmo, B. P. (2012). Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(3), 299–324.
- Chopra, S., & Meindl, P. (2016). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (6th ed.). Pearson.
- Coase, R. H. (1960). *The Problem of Social Cost*. *Journal of Law and Economics*.
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper & Row.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Ferianto, R. (2015). *Strategi nasional reformasi regulasi mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Grossman, G. M., & Helpman, E. (2001). *Special interest politics*. MIT Press.
- Gruber, J. (2019). *Public finance and public policy* (6th ed.). Worth Publishers.
- Gruber, J. (2019). *Public finance and public policy* (6th ed.). Worth Publishers.
- Guritno Mangkoesoebroto. (2018). *Ekonomi publik* (Edisi ke-3). BPFE-Yogyakarta.
- Halim, A., Kusufi, M. S., & Nurlaila, N. (2020). *Teori dan praktik keuangan negara serta ekonomi publik di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A., Kusufi, M. S., & Nurlaila, N. (2020). *Teori dan praktik keuangan negara serta ekonomi publik di Indonesia*. Salemba Empat.
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- Ikhsan, M. (2019). Ekonomi publik dan tantangan pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 10(1), 15–28.
- Ikhsan, M. (2019). Ekonomi publik dan tantangan pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 10(1), 15–28.
- Kemenkeu. (2024). *Ini strategi kebijakan fiskal 2024 untuk percepat transformasi ekonomi*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2016). *Presiden: Deregulasi diperlukan untuk meningkatkan iklim investasi*.

- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Macmillan.
- Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. *The American Economic Review*, 64(3), 291–303.
- Kurniawan, R., & Managi, S. (2018). Economic growth and sustainable development in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 339–361.
- Laffont, J. J., & Tirole, J. (1991). *The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture*. Oxford University Press.
- Lerner, J. (2014). *Urban design in the real world: The Curitiba experience*. Island Press.
- LTA Singapore. (2023). *Land transport master plan 2040: Connecting people, places, and opportunities*. Land Transport Authority.
- Mangkoesoebroto, G. (2001). *Ekonomi publik*. BPFE.
- Mankiw, N. G. (2020). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publishers.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian populism. *Policy Studies*, 72, 1–74.
- Mishkin, F. S. (2018). *The economics of money, banking, and financial markets* (12th ed.). Pearson.
- Mulyanto, F. (2022). Tantangan pemungutan pajak ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 241–252.

- Mulyanto, F. (2022). Tantangan pemungutan pajak ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 241–252.
- Munger, M. C. (2018). *Tomorrow 3.0: Transaction costs and the sharing economy*. Cambridge University Press.
- Murawe, P. B., Murni, S., & Tulung, J. E. (2021). Analisis efektivitas kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 856–865.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Niskanen, W. A. (1971). *Bureaucracy and representative government*. Aldine-Atherton.
- Nugroho, Y., Syarief, Y., & Fiantis, D. (2021). Digital transformation and public policy in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Southeast Asian Public Administration*, 14(1), 45–62.
- Nugroho, Y., Syarief, Y., & Fiantis, D. (2021). Digital transformation and public policy in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Public Administration*, 14(1), 45–62.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- OCBC. (2023). *Mengenal dampak resesi ekonomi bagi masyarakat & ciri-ciri terjadinya*.
- Olson, M. (1965). *The logic of collective action*. Harvard University Press.
- Pasichnyi, M. (2020). Empirical study of fiscal policy impact on economic growth. *Problems and Perspectives in Management*, 15(3), 316–322.

- Pigou, A. C. (1932). *The Economics of Welfare*. Macmillan and Co.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
- Purba, B., Albra, W., et al. (2021). *Ekonomi publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Anindya, D. A., Abdullah, S., et al. (2024). *Ekonomi publik: Teori dan penerapan kebijakan fiskal*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Arfandi, S. N., et al. (2021). *Ekonomi demografi*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Handiman, U. T., et al. (2023). *Pengantar ekonomi politik*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., et al. (2021). *Ekonomi pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rantebua, S., Rosnawintang, R., & Suriadi, L. O. (2020). Analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 5(1).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Resosudarmo, B. P. (2021). Environmental policies and sustainability in Indonesia. In *The Indonesian economy* (pp. 215–238). Routledge.
- Rijkswaterstaat. (2022). *Room for the river: Safety for four million people*. Ministry of Infrastructure and Water Management, Netherlands.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox*. W. W. Norton & Company.
- Rohima, S. (2020). *Ekonomi publik*. Universitas Sriwijaya.

- Samuelson, P. A. (1954). The pure theory of public expenditure. *The Review of Economics and Statistics*, 36(4), 387–389.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Shara, M. C. P. (2021). Kebijakan countercyclical sebagai upaya kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Hukum Magister Hukum UI*, 1(3), 1301–1320.
- Siagian, S. P. (1994). *Patologi birokrasi: Analisis identifikasi dan terapinya*. Ghalia Indonesia.
- Siagian, S. P. (1994). *Patologi birokrasi: Analisis identifikasi dan terapinya*. Ghalia Indonesia.
- Siregar, R. T., et al. (2021). *Ekonomi industri*. Yayasan Kita Menulis.
- Sloan, S. (2014). The law of the haze in Southeast Asia. *The Journal of Environment & Development*, 23(4), 465–486. <https://doi.org/10.1177/1070496514552462>
- Smith, A. (1776). *The wealth of nations*. W. Strahan & T. Cadell.
- Stigler, G. J. (1971). *The Theory of Economic Regulation*. The Bell Journal of Economics and Management Science.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the impact of COVID-19 on poverty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192.
- Suryani, A. S. (2012). Penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Aspirasi*, 3(1), 45–58.

- Terra. (2023). *Demand forecasting: Pengertian, pentingnya, faktor, dan jenisnya*.
- Thoha, M. (2004). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Vintilă, G., Gherghina, Ș. C., & Chiricu, C. Ș. (2021). Fiscal policy and economic growth. *Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research*, 55(2), 229–246.
- Viscusi, W. K., Harrington, J. E., & Sappington, D. E. M. (2018). *Economics of Regulation and Antitrust*. MIT Press.
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2019). *Kebijakan bank sentral: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Wicaksono, K. W. (2012). Barang publik dan eksternalitas pada era otonomi daerah. *Jurnal Bina Praja*, 4(4), 281–286.
- Workshop “Regulatory reform in Indonesia”. (2015, March 25). Bappenas.
- World Bank. (2023). *GovTech maturity index 2022: The state of public sector digital transformation*. World Bank Publications.
- Yescombe, E. R. (2013). *Public-private partnerships*. Butterworth-Heinemann.
- Zulhilmi, M. (2017). Krisis keuangan Eurozone. *Media Syari’ah*, 15(2), 197–208.

PROFIL PENULIS



Jahrizal, lahir pada tanggal 21 November 1962 di Duri, kabupaten Bengkalis. Riwayat pendidikan untuk jenjang S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Riau dengan mengambil Jurusan Ekonomi Pembangunan dan lulus pada tahun 1986. Kemudian melanjutkan pendidikan pada pascasarjana atau S2 di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan mengambil Jurusan Studi Pembangunan dan lulus pada tahun 2003. Pada tahun 2012 telah menyelesaikan program Doktoran pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dengan mengambil Jurusan Manajemen Pembangunan.

Saat ini beliau menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau untuk program S1 Ilmu Ekonomi dan Pascasarjana S2 Manajemen. Untuk mata kuliah yang diampu saat ini adalah ekonomi industry, ekonomi publik, ekonomi manajerial, dan ekonomi mikro. judul studi terbaru yang telah dilaksanakan adalah Inovasi Model Bisnis Budidaya Kambing Etawa yang Terintegrasi Pertanian Organik Menggunakan Internet of Things - Pengembangan Produk Binder Berbasis Lateks Karet Alam sebagai substitusi komponen impor untuk

Cat Emulsi Kedap Air - Smart Machine Vision Berbasis Pencitraan Multispektral Untuk Sortasi Dan Grading Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. Untuk pengalaman pengabdian untuk masyarakat yang pernah dilaksanakan diantaranya adalah Inovasi Model Bisnis Budidaya Kambing Etawa yang Terintegrasi Pertanian Organik Menggunakan Internet of Things (2024) - Pengembangan Produk Binder Berbasis Lateks Karet Alam sebagai substitusi komponen impor untuk Cat Emulsi Kedap Air (2024) - Smart Machine Vision Berbasis Pencitraan Multispektral Untuk Sortasi Dan Grading Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (2022). Selain aktif dalam berbagai penulisan penulis juga aktif dalam penulisan berbagai publikasi diantaranya adalah Advantages of the Location of the Bukit Batu Small and Medium Weaving Industry Center, Bengkalis Regency (2024) - The Impact Of Government Spending, Financial Deepening, And Unemployment On Poverty Reduction In Indonesia (2024) - The Economics of Vision's Machine For Sorting Palm Fruit Bunches to Increase Indonesia's CPO Exports (2023). Selain itu penulis juga memiliki Paten/HKI yaitu Aplikasi Manajemen Budidaya Kambing Etawa Terintegrasi Pertanian Organik Sistem Monitoring Sensor IoT - Sistem Informasi Manajemen Buah Sawit.

Email Penulis: jahrizal@lecturer.unri.ac.id



Muhammad Thufeil Ghifary, S. Akun yang akrab disapa Fary, lahir di Kotobaru pada 30 April 1997 sebagai anak pertama dari pasangan H. Cecep Mauluddin dan Indria Oktaviany. Penulis menempuh Pendidikan Diploma III pada Progam Studi DIII Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN dan Pendidikan

Strata I Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka. Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan DIII pada tahun 2018 dan Pendidikan S1 pada tahun 2021. Selama masa perkuliahan, penulis juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara Golongan II/C sebagai Pelaksana serta Penyusun Laporan Keuangan di Subbagian Tata Usaha, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Sumatera Bagian Selatan, Kementerian Perhubungan. Tugas dan Fungsi penulis terfokus diseputaran penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Negara serta Analisa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga Akuntansi menjadi pengetahuan dasar yang menunjang terlaksananya tugas dan fungsi pada instansi pemerintah terkait. Berbagai pengalaman tersebut turut membentuk cara pandangnya yang kritis, adaptif dan inovatif dalam menghadapi dinamika dunia birokrasi dan tata kelola kebijakan publik yang terus berkembang.

Saat ini, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada **Program Studi S2 Ilmu Ekonomi** di **Universitas Riau** sebagai bentuk komitmen untuk memperdalam pengetahuan serta meningkatkan kompetensi profesional, khususnya dalam memahami isu-isu strategis dan empiris di bidang pemerintahan. Prinsip yang ia pegang sejalan dengan keyakinannya bahwa *“Ekonomi pada dasarnya*

adalah ilmu tentang pilihan dan bagaimana orang lain memilih". Bagi penulis, kutipan ini bukan sekadar ungkapan, melainkan landasan berpikir bahwa selama kita hidup kita akan dikemukakan dengan banyaknya pilihan, ditambah dengan sumber daya yang kita miliki itu terbatas, maka kita perlu menambah wawasan serta memperkaya pengetahuan agar kelak kita dapat menikmati, mempertanggungjawabkan serta tidak menyesali langkah ataupun keputusan yang kita ambil.

Penulis sangat terbuka terhadap berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Pembaca dapat menyampaikan tanggapan melalui email: mt.ghifary@gmail.com. Besar harapannya agar buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur di bidang Ekonomi.



Nadia Islami. yang akrab disapa Nadia, lahir di Bangkinang pada 28 Oktober 1997 sebagai anak kedua dari pasangan Adi Imran dan Nani Yunita. Penulis menempuh pendidikan tinggi pada Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang dengan konsentrasi Ekonomi Publik. Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2019 selama 4 tahun. Selama masa perkuliahan, penulis tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri dan organisasi. Penulis juga pernah mendapat Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ristek Dikti.

Saat ini, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada **Program Studi S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Riau** sebagai bentuk komitmen untuk memperdalam pengetahuan serta meningkatkan kompetensi profesional, khususnya dalam memahami isu-isu dan kebijakan yang bisa diambil dalam ekonomi publik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi penulis dalam memperkaya literatur ekonomi publik, khususnya dalam konteks Indonesia, serta sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa dan pembaca yang tertarik pada kajian kebijakan publik.

Penulis sangat terbuka terhadap berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Pembaca dapat menyampaikan tanggapan melalui email: nadiaislami28@gmail.com. Penulis berharap buku ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang ekonomi publik.



Rifky Alrivani, S.E. yang akrab disapa Rifky, lahir di Teluk Kiambang pada 22 Juli 2002 sebagai anak kedua dari pasangan Rudiansyah dan Hj. Labziah. Penulis menempuh pendidikan tinggi pada Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2024. Selama masa perkuliahan, penulis tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri. Ia terlibat dalam Koordinasi Kecamatan

sebagai Ketua Koordinasi Kecamatan pada masa KKN di Kecamatan Tempuling serta mengikuti program Seminar Internasional Perekonomian Dunia sebagai peserta seminar tersebut. Berbagai pengalaman tersebut turut membentuk cara pandangnya yang kritis, adaptif dan inovatif dalam menghadapi dinamika dunia bisnis yang terus berkembang.

Saat ini, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada **Program Studi S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Riau** sebagai bentuk komitmen untuk memperdalam pengetahuan serta meningkatkan kompetensi profesional, khususnya dalam memahami isu-isu strategis dan fungsional di bidang ilmu ekonomi. Prinsip yang ia pegang sejalan dengan keyakinannya bahwa *“Dalam ekonomi kita dapat berbagai Pelajaran baik di dunia maupun akhirat sehingga dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat”*. Bagi penulis, kutipan ini bukan sekadar ungkapan, melainkan landasan berpikir bahwa keberhasilan lahir dari kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, mengambil keputusan yang tepat, serta menciptakan nilai berkelanjutan.

Penulis sangat terbuka terhadap berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Pembaca dapat menyampaikan tanggapan melalui email: rifkyalrifany03@gmail.com. Besar harapannya agar buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur di bidang Ekonomi, khususnya Ekonomi Publik.



Rizka Safira, S.E. merupakan lulusan Program Studi Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2025. Selama menempuh pendidikan sarjana, penulis aktif berkontribusi dalam berbagai organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi, fakultas, hingga universitas. Dalam bidang akademik, penulis mencatatkan prestasi sebagai Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Ekonomi Islam pada ajang Temu Ilmiah Regional (TEMILREG) se-Sumatera Bagian Tengah tahun 2023. selama menempuh studi, penulis juga penerima Beasiswa Prestasi dari Pemerintah Provinsi Riau sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi capaian akademik. Komitmen penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan mentoring karya tulis ilmiah bagi siswa dalam program Madrasah Young Researchers (MYRES). Di samping itu, penulis juga dipercaya sebagai delegasi dalam program KKN Kebangsaan XII tahun 2024 yang dilaksanakan di Maluku, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus memperluas wawasan kebangsaan.

Saat ini, penulis tengah melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada **Program Studi S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Riau**. Bagi penulis, *“Ekonomi tidak hanya sekedar teori dan angka melainkan The Queen of Social Sciences yang mampu menjelaskan berbagai fenomena kehidupan”* sehingga penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan kapasitas diri dan memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif, khususnya dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Penulis membuka ruang seluas-luasnya bagi pembaca untuk memberikan masukan, saran, maupun kritik yang konstruktif sebagai bagian dari proses penyempurnaan karya ini. Segala bentuk tanggapan dapat disampaikan melalui email: ikafira1453@gmail.com. Penulis berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber bacaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi pemikiran yang bermakna dalam pengembangan literatur di bidang Ekonomi, serta menjadi pemantik lahirnya diskusi dan kajian yang lebih luas.



Wahyu Indah Astuti, S.E. yang biasa dipanggil Indah, lahir di Sendang Agung pada 25 Desember 1994 sebagai anak ke % dari 6 bersaudara dari pasangan Alm. Mujiono dan Mawiti. Penulis menempuh pendidikan dasar sampai Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung. Lalu pada Tahun 2012 Penulis dinyatakan lulus

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) melalui jalur tertulis pada Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2016. Selama perkuliahan penulis juga aktif di beberapa organisasi baik tingkat Fakultas maupun tingkat Universitas. Penulis aktif sebagai anggota BSO Penelitian di organisasi Kajian Studi Ekonpmi Islam (KaSEI) dan terakhir sebelum kelulusan penulis sebagai Staf Protokoler Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau.

Saat ini, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada **Program Studi S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Riau** ditengah kesibukannya menjabat sebagai

Pelaksana tugas Kepala Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Penulis meyakini sebuah kutipan yaitu *"Selain Do'a Ibu yang menyelamatkan perempuan adalah karir dan pendidikan"*. Bagi penulis kutipan tersebut sangat bermakna sehingga menjadi salah satu dorongan penulis untuk melanjutkan pendidikan meskipun sudah 9 tahun lulus dari jenjang Strata 1 (S1). Untuk itu penulis terbuka terhadap masukan, saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Pembaca dapat menyampaikan tanggapan melalui email wahyu.indah.astuti@gmail.com besar harapan agar buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literature di bidang ekonomi, khususnya ekonomi publik.



Prasetyo Medhi lahir di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 13 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Sri Budhiman dan Ibu Arsi Merri Yanti. Pendidikan formal yang ditempuh penulis Adalah pada tahun 2023, lulus dari Universitas Riau jurusan Ilmu Ekonomi, dan Saat ini penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada **Program Studi S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Riau** sebagai bentuk komitmen untuk memperdalam pengetahuan serta meningkatkan kompetensi profesional, khususnya dalam memahami isu-isu strategis dan fungsional di bidang ekonomi modern.

Sejak masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan. Ketertarikan penulis terhadap bidang ekonomi regional dan

pembangunan mendorongnya untuk melakukan berbagai penelitian terkait disparitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Selain aktif di bidang akademik, penulis juga memiliki minat dalam bidang kewirausahaan, khususnya dalam usaha perdagangan seperti telur dan beras. Pengalaman tersebut turut memberikan wawasan praktis dalam memahami kondisi ekonomi masyarakat secara langsung.

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.



Muhammad Arjun, S.E. yang akrab disapa Arjun, lahir di Tanjung Baru pada 12 Agustus 1999. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Nofiansyah dan Kartina. Penulis menempuh pendidikan tinggi pada Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jambi, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2021.

Selama masa perkuliahan, penulis tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri, baik intra maupun ekstra kampus. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua KSPM Sang Surya pada tahun 2019, Wakil Ketua Asosiasi KSPM Jambi pada tahun 2018, serta Sekretaris Umum IMM Universitas Muhammadiyah Jambi pada tahun 2020. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti berbagai organisasi dan forum, seperti IMPR Jambi dan HIPMI Indragiri Hilir.

Di samping aktivitas organisasi, penulis juga menorehkan berbagai prestasi di bidang akademik. Bersama tim, penulis meraih Juara II dalam Kompetisi Debat Mahasiswa tingkat kampus pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020, penulis kembali meraih prestasi sebagai Juara I dalam Kompetisi Debat Mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa (Forkomawa) Provinsi Jambi.

Berbagai pengalaman organisasi dan prestasi tersebut turut membentuk pola pikir penulis yang kritis, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika perkembangan ilmu ekonomi yang terus berkembang.

Saat ini, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Universitas Riau sebagai bentuk komitmen untuk memperdalam pengetahuan serta meningkatkan kompetensi profesional, khususnya dalam memahami isu-isu strategis dan fungsional di bidang ekonomi modern.

Penulis terbuka terhadap berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Pembaca dapat menyampaikan tanggapan melalui email: mhad.arjun@gmail.com. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur di bidang ekonomi, khususnya Ekonomi Publik.

DIALEKTIKA EKONOMI PUBLIK

Bagaimana sebuah negara menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan keterbatasan anggaran, dan mengapa kebijakan ekonomi yang terlihat mapan di atas kertas sering kali menemui jalan buntu saat diimplementasikan? Buku **“Dialektika Ekonomi Publik: Teori Strategis dan Realita Kebijakan di Indonesia”** membedah anatomi ekonomi publik di tanah air melalui kacamata dialektika yang berpijak pada fakta empiris. Penulis tidak sekadar menyajikan konfrontasi antara teori-teori fundamental seperti efisiensi pasar, penyediaan barang publik, dan eksternalitas, namun dengan realitas lapangan, melainkan secara spesifik menghadirkan kajian kritis berbasis hasil penelitian terhadap berbagai kebijakan ekonomi publik saat ini. Di dalamnya, dibahas secara tajam strategi fiskal, paradoks pembangunan yang menyoroti ketegangan antara pertumbuhan dan pemerataan, hingga evaluasi riset atas dinamika kebijakan nyata seperti subsidi, perpajakan, dan pembiayaan infrastruktur. Buku ini bukan sekadar literatur teknis, melainkan sebuah navigasi akademis untuk memahami tarikan kuat antara teori idealis dan realitas praktis politik-ekonomi di balik layar. Sebuah bacaan esensial bagi siapa saja yang meyakini bahwa ekonomi adalah alat strategis untuk mencapai keadilan sosial, sekaligus berani mempertanyakan efektivitas kebijakan yang mengatasmakan kepentingan publik.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-433-4

